

TERBIT SEJAK 6 NOVEMBER 1945



Jangan Korupsi: Antara Seruan Moral dan Realitas Sistemik

Oleh : Ngatirin

GUBERNUR Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, kembali menarik perhatian publik saat melantik 60 pejabat baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam amanatnya, Bobby mengingatkan satu hal mendasar: "Jangan korupsi".

Ia mengaku geram karena belum genap empat bulan memimpin, sudah tiga orang pejabat di lingkungannya yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia pun mengimbau para pejabat untuk menjaga marwah, menjaga nama baik keluarga, karena bila tersandung korupsi, rasa malu itu bukan hanya milik pribadi, tetapi

■ Bersambung ke Hal 11



Pasca Penangkapan Topan Ginting

KPK Diminta Untuk Tidak Tebang Pilih

Medan, MIMBAR - Diringkusnya eks Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting mengundang perhatian dari berbagai kalangan. Tak hanya mencoreng personal Topan, tetapi juga mencoreng wajah Sumatera Utara.

Demikian disampaikan Ketua Umum Barisan Pemuda Indonesia, Zul Effendi Gultom, Senin (7/7/2025).

"Keprihatinan saya sebagai masyarakat Sumut terhadap OTT KPK dalam proyek jalan provinsi di Palas, kian mencoreng wajah Sumut. Mental oknum Kadis PUPR Pemprov (Topan Ginting) ini sangat memalukan. Betul-

■ Bersambung ke Hal 11

Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Kembali Disoal

KPK Didesak Panggil Bobby Nasution

Jakarta, MIMBAR - Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAM-AK) Sumatera Utara bersama Aliansi Masyarakat Peduli Hukum dan Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonesia (AMDHI) mengeluarkan pernyataan sikap keras mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil, memeriksa, dan menetapkan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai tersangka.

D esakan ini muncul menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, yang disebut-sebut sebagai orang dekat Gubernur.

Dalam pernyataan sikap yang diterima media, KAMAK menyoroti dugaan keterlibatan Bobby Nasution dalam proyek infrastruktur jalan senilai Rp 231,8 miliar APBD SUMUT TA 2025.

"Kami sangat menyayangkan, semestinya pembangunan di Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Bobby Nasution yang baru dilantik malah tersandung OTT KPK RI," ujar Asep Haliar, Koordinator Lapangan KAMAK, didampingi Saipul Adam selaku Koordinator Aksi. saat demo di Depan Gedung KPK, Senin (7/7).

KAMAK juga mendesak KPK untuk memperluas pemeriksaan terhadap Bobby Nasution terkait masa j

■ Bersambung ke Hal 11



Warga Aceh Tolak Batalyon Teritorial Baru di 5 Daerah

Aceh, MIMBAR - Sejumlah warga dari Aliansi Rakyat Aceh Menggugat menolak pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan di 5 daerah dan meminta TNI AD untuk mengembalikan pengelolaan tanah wakaf Blang Padang ke Masjid Raya Baiturrahman.

Mereka menilai pembangunan Batalyon baru di Kabupaten Nagan Raya, Pidie, Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Aceh Timur melanggar butir-butir MoU Helsinki.

Dalam MoU tersebut salah satu poinnya yaitu keberadaan personel TNI organik di Aceh hanya boleh 14.700 personel.

"Data yang kita peroleh sekarang sudah hampir 18 ribu personel TNI di Aceh apabila ditambah lagi Batalyon maka personel TNI tambah banyak lagi. Ini tentu melanggar perjanjian MoU Helsinki," kata

■ Bersambung ke Hal 11



Menelusuri Kasus Lahan 60 Hektar Eks Kusta di Hutasaalem Pemprov Sumut Diminta Turun Tangan

DIREKTUR Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumut (LIPPSU) Azhari AM Sinik mendesak Pemprov Sumut menuntaskan kasus yang kini sedang bergejolak di UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta Lau Simomo, Hutasaalem, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, terkait



■ Mungkinkah...!
■ He..he..he..

Kasus Ijazah Palsu Jokowi Roy Suryo Diperiksa Polda Metro

Jakarta, MIMBAR - Roy Suryo dicecar 85 pertanyaan oleh penyelidik terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Senin (7/7).

"Saya ada 85 pertanyaan dengan 55 halaman, maka bisa diselesaikan dengan sangat cepat," kata Roy kepada wartawan.

Roy tak membeberkan secara rinci ihwal puluhan pertanyaan tersebut. Namun, ia mengaku hanya menjawab pertanyaan seputar identitas saja.

"Yang lain (enggak dijawab) karena enggak ada hubungannya, enggak saya jawab, maknanya prosesnya (pemeriksaan) singkat," ujarnya.

Di sisi lain, Roy turut mempertanyakan ihwal lima laporan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi tersebut. Kata dia, para pelapor itu tidak memiliki kedudukan hukum.

"Mereka itu yang lapor-lapor ini, yang lopar-lapor ini aneh gitu, karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya, tidak ada saudara, hubungan saudara, hubungan darah dia dengan Joko Widodo," ucap Roy.

"Ya gitu, jadi aneh kalau mereka kemudian merasa ikut menjadi yang harus telapor, terhina-hinanya se-rendah-rendahnya itu tidak ada," imbuhnya.

Roy turut mengklaim pihaknya juga telah menyerahkan surat ke kepolisian terkait persoalan kedudukan hukum para pelapor tersebut. Ia berharap hal itu bisa dijadikan pertimbangan penyelidik dalam mengutus laporan tersebut.

"Jadi mereka, lima pihak itu tidak ada legal standing-nya, apalagi mereka mengatasnamakan,

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

12 MUHARRAM 1447 H

Imsak : 04:49 WIB	Ashar : 15:59 WIB
Subuh : 04:59 WIB	Maghrib : 18:42 WIB
Zuhur : 12:32 WIB	Isya : 19:57 WIB

■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah

Siapa Orang Bahagia

Oleh Dr. A. Rasyid, MA

Di era digital ini, kebahagiaan sering dipahami secara sempit. Seolah-olah bahagia hanya milik mereka yang kaya raya, terkenal, hidup glamor, dan selalu tersenyum di media sosial. Kita disuguhkan potret bahagia lewat gambar-gambar liburan, makanan mewah, pasangan ideal, hingga pencapaian akademik dan karier yang mengilap. Namun, benarkah semua itu adalah definisi sejati dari bahagia?

Islam menawarkan sudut pandang yang sangat berbeda—bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada kondisi lahiriah, tetapi bertumpu pada ketenangan batin, hubungan



■ Bersambung ke Hal 11

■ Bersambung ke Hal 11